PENERAPAN *E-PROCUREMENT* DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA

Retno Maryam Supraba dan Agus Bandiyono

Politeknik Keuangan Negara STAN Jakarta

Abstract: Implementation of E-Procurement in Procurement Process. This study aims to identify and understand in detail the process of procurement of goods and services within the government, particularly the Ministry of Commerce by using e-procurement as well as to compare between the practice of procurement of goods / services through e-procurement in the Ministry of Trade with the applicable rules. This research was conducted using the method of library research (library research) and methods of field research through observation and interviews. The results showed that the e-procurement system more advantages compared to the conventional manner. E-procurement in terms of the level of budget use is more efficient because each year the Ministry of Trade gained considerable margin significantly between the price of the winning bidder at a price of its own estimates (HPS) after using e-procurement, in terms of transparency is more transparent because it is done through the application SPSE, and from in terms of a more efficient e-procurement for the procurement of goods / services faster than using conventional means. The author found some loopholes deficiencies or obstacles that occur during the implementation of e-procurement in the Ministry of Commerce, among others: the persistence of the members of the procurement committee or even providers of goods/ services that they did not fully understand how to use the application SPSE used for the goods/ services; SPSE used and the application is still under development by LKPP, causing the process a little disturbed.

Abstrak: Penerapan *E-Procurement* dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara lebih detil mengenai proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan dengan menggunakan *e-procurement* serta untuk membandingkan antara praktik pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* di Kementerian Perdagangan dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *e-procurement* lebih banyak keuntungannya dibandingkan dengan cara yang konvensional. *E-procurement* ditinjau dari tingkat penggunaan anggarannya lebih efisien karena tiap tahun Kementerian Perdagangan memperoleh selisih yang cukup signifikan antara harga pemenang lelang dengan harga perkiraan sendiri (HPS) setelah menggunakan *e-procurement*, dari segi transparansi lebih transparan karena dilakukan melalui aplikasi SPSE, dan dari segi waktu *e-procurement* lebih efisien karena proses pengadaan barang/jasa lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan cara konvensional. Penulis menemukan beberapa celah kekurangan atau kendala yang terjadi selama penerapan *e-procurement* di Kementerian Perdagangan antara lain: masih adanya anggota panitia pengadaan atau bahkan penyedia barang/jasa yang masih belum paham mengenai cara penggunaan aplikasi SPSE yang digunakan untuk proses pengadaan barang/jasa; serta aplikasi SPSE yang digunakan masih dalam tahap pengembangan oleh LKPP, sehingga menyebabkan proses sedikit terganggu.

Kata Kunci: administrasi publik, *e-procurement*, pengadaan barang dan jasa

PENDAHULUAN

Salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan *good governance* adalah dengan pengelolaan keuangan negara yang baik. Keuangan negara yang baik harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini Kementerian Keuangan selaku pembantu Presiden telah membuat tiga paket undang-undang di bi-

dang keuangan negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa (1) Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara., dan (2) Da-

lam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun disusun APBN dan APBD.

Dalam pasal tersebut jelas mengisyaratkan bahwa keuangan negara dapat digunakan untuk melakukan atau menyelenggarakan suatu program atau kegiatan asalkan hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan bernegara. Salah satu bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan seperti dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi yang selanjutnya disebut K/L/D/I.

Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu kegiatan pendukung yang dapat membantu terselenggaranya fungsi pemerintahan dalam menciptakan pembangunan sebuah negara. Pengadaan barang/jasa pemerintah ini diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Namun dalam proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa seringkali ditemukan banyak masalah ataupun kasus yang membuat proses pengadaan barang/jasa menjadi terhambat.

E-Procurement merupakan salah satu gagasan yang dianggap dapat menanggulangi beberapa permasalahan dalam proses pengadaan barang/jasa. *E-Procurement* adalah suatu proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik. *E-Procurement* mulai digunakan di Indonesia sejak tahun 2003 dengan terbitnya Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya diatur lebih dalam di Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kementerian Perdagangan merupakan salah satu kementerian yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Kementerian ini bergerak di bidang perdagangan serta konsen dalam mengurus permasalahan dalam perdagangan internasional. Kementerian Perdagangan sebelumnya disebut dengan Departemen Perindustrian dan Perda-

ngangan. Kemudian pada masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, terjadi pemisahan tugas dan wewenang atas Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sehingga keduanya menjadi Departemen yang berdiri sendiri hingga sekarang. Sedangkan perubahan penyebutan Departemen menjadi Kementerian berlaku sejak Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara diterbitkan.

LPSE Kemendag adalah unit kerja yang dibentuk di Kementerian Perdagangan untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Unit Layanan Pengadaan Kementerian Perdagangan melaksanakan Instruksi Presiden tersebut dengan berfokus pada beberapa hal. Pertama, dalam hal pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada satuan-satuan kerja melalui Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) telah menunjukkan kemajuan yang berarti. Kemajuan ini merupakan hasil asistensi penyusunan RUP yang dilakukan secara intensif oleh ULP Kementerian Perdagangan pada akhir triwulan 2014. Asistensi tersebut dilakukan dengan memberikan bantuan teknis secara langsung pada satker-satker di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam menerjemahkan perencanaan anggaran menjadi paket-paket pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan Laporan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perdagangan, memasuki tahun anggaran 2015, ULP Kementerian Perdagangan menargetkan untuk mempertahankan prestasi 100% *e-procurement* sama seperti tahun 2013 dan 2014. Dengan demikian, ULP pada dasarnya telah melaksanakan butir ketiga dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemanfaatan *e-*

procurement pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perdagangan telah memberikan hasil nyata dalam efisiensi anggaran.

Pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan pengadaan yang dilakukan untuk mendapatkan barang ataupun jasa. Sedangkan pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2012 adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang dimulai dengan proses perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, sebab barang atau jasa tersebut nantinya memang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Kalakota *et al.* dalam Widjaja (2009:39) menyatakan bahwa: “*E-Procurement* merupakan proses pengadaan barang atau lelang dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk website.” Sedangkan dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 pasal 1 ayat 37 dikatakan tentang pengertian *e-procurement* sebagai berikut: “Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Berdasarkan paparan berbagai sumber di atas dapat disimpulkan bahwa *e-procurement* adalah suatu pengadaan barang maupun jasa yang prosesnya dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan berlandaskan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. *E-procurement* dianggap dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya *e-procurement* dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu *e-tendering* atau *e-purchasing*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara lebih detil mengenai proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan dengan menggunakan *e-procurement* serta untuk membandingkan antara praktik pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* di Kementerian Perdagangan dengan aturan yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan dengan cara mempelajari dan membandingkan antara sumber-sumber tertulis yang diperoleh. Metode penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh pengertian dasar dan konsep yang digunakan untuk melakukan tinjauan atas permasalahan yang dibahas. Adapun metode penelitian lapangan dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan penulis dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan yaitu di Kementerian Perdagangan yang bertujuan untuk mendapatkan data-data terkait. Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan pejabat terkait pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perdagangan dengan harapan memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan baik secara manual maupun *e-procurement* tidak memiliki banyak perbedaan. Tahapan yang dilalui dalam pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* sama dengan yang dilalui dalam pengadaan secara manual, hanya saja melalui *e-procurement* seluruh prosedur dilaksanakan melalui sarana elektronik. Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement*. Di bawah ini, penulis akan memaparkan tahapan dari proses pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* di Kementerian Perdagangan.

a. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan

Tahapan pertama dimulai dengan Menteri Perdagangan selaku Pengguna Anggaran (PA) menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Dalam menyusun RUP, PA/KPA juga menentukan cara yang akan digunakan dalam proses pengadaan, apakah pengadaan dilakukan dengan melalui Penyedia Barang/Jasa atau melalui Swakelola.

b. Pengumuman dan Pendaftaran Lelang

Tahapan selanjutnya adalah pengumuman lelang ke publik. Lelang diumumkan melalui aplikasi SPSE dimana pada aplikasi tersebut diberikan informasi rinci mengenai proses lelang mulai dari jadwal pemilihan, nilai pagu, serta syarat-syarat lainnya terkait lelang. Setelah itu Penyedia barang/jasa dapat langsung melakukan pendaftaran untuk menjadi peserta lelang masing-masing paket pengadaan. Pendaftaran lelang dilakukan secara *online* dan pada saat pendaftaran telah dilakukan maka Pakta Integritas juga sudah otomatis ditandatangani.

c. Aanwijzing (Pemberian Penjelasan)

Pemberian penjelasan terhadap masing-masing paket lelang dilakukan secara *online* melalui aplikasi SPSE. Pokja ULP memberikan penjelasan yang dianggap penting terkait dokumen pengadaan. Pada tahapan ini, Penyedia diberikan waktu untuk bertanya dan Pokja ULP akan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penyedia selama waktu yang telah diberikan masih ada. Selanjutnya Pokja ULP membuat adendum dokumen yang nantinya akan diunggah ke dalam aplikasi SPSE.

d. Penyampaian Dokumen Kualifikasi oleh Penyedia Barang/Jasa

Penyedia barang/jasa selanjutnya menyampaikan dokumen kualifikasi berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan Pokja ULP melalui *form* isian elektronik pada aplikasi SPSE.

e. Penyampaian Dokumen Penawaran oleh Penyedia Barang/Jasa

Penyampaian dokumen penawaran oleh Penyedia dilakukan melalui fitur yang ada pada aplikasi SPSE. Dalam *e-tendering*, tata cara penyampaian dokumen penawaran adalah berupa satu *file*, dua *file*, dan dua tahap. Satu *file* berarti seluruh dokumen yang berisi dokumen administrasi, teknis, dan harga disampaikan secara bersamaan dalam satu waktu dalam satu *file* penawaran yang telah dienkripsi. Dua *file* adalah dokumen administrasi dan teknis disampaikan

dalam satu *file* penawaran yang telah dienkripsi serta *file* penawaran terenkripsi lainnya yang berisi harga penawaran, disampaikan secara bersamaan. Sedangkan dua tahap adalah dimana Penyedia menyampaikan satu *file* terenkripsi berisi dokumen administrasi dan teknis dalam satu dokumen penawaran serta *file* penawaran terenkripsi lainnya yang berisi harga penawaran, disampaikan dalam waktu yang berbeda sampai dengan waktu yang telah ditentukan.

f. Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran

Setelah semua dokumen penawaran dikirimkan oleh Penyedia, Pokja ULP akan membuka dokumen tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Pembukaan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran ini dilakukan menggunakan aplikasi Apendo/Spamkodok dengan mengunduh *file* yang telah diunggah Penyedia. Selanjutnya Pokja ULP menyampaikan hasil evaluasi kualifikasi dan evaluasi penawaran melalui aplikasi SPSE.

g. Pengumuman Pemenang

Tahapan selanjutnya adalah pengumuman pemenang lelang. Pengumuman pemenang lelang melalui cara *e-tendering* juga dilakukan secara *online*. Pokja ULP mengumumkan pemenang lelang dan cadangan pemenang lelang dengan menggunakan aplikasi SPSE yang selanjutnya dapat dilihat langsung oleh seluruh peserta lelang.

h. Sanggahan

Melalui cara *e-tendering*, sanggahan yang diajukan oleh Peserta Lelang hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali. Pokja ULP juga hanya dapat menjawab sanggahan sebanyak 1 kali. Tahap sanggahan ini juga dilakukan melalui aplikasi SPSE. Pada tahun anggaran 2013 tercatat terdapat 14 buah sanggahan, sedangkan pada tahun anggaran 2014 terdapat 13 buah sanggahan.

i. Pembuatan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Dalam tahap ini, PPK bertugas untuk membuat dan mencetak SPPBJ dari aplikasi SPSE serta langsung menandatangani surat tersebut. Selanjutnya SPPBJ tersebut dipindai dan dikirimkan oleh PPK kepada Penyedia Baran/Jasa yang ditunjuk melalui aplikasi SPSE.

j. Penandatanganan Kontrak

Sama halnya dengan pembuatan SPPBJ,

kontrak juga dibuat dan dicetak melalui aplikasi SPSE oleh PPK. Setelah dicetak, penandatanganan kontrak oleh PPK dengan Pemenang Pemilihan dilakukan di luar aplikasi.

k. Pelaksanaan E-Procurement dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa

Setelah pemenang lelang terpilih, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dimulai. Berikut penulis paparkan hasil dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-procurement untuk tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015.

♦Tahun Anggaran 2013

Secara keseluruhan, hingga November tahun 2013, ULP Kementerian Perdagangan telah berhasil melaksanakan 120 paket dengan nilai total harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 483.229.439.837,-. Berdasarkan angka realisasi tersebut, 120 dari 122 paket pekerjaan pada RUP telah dilaksanakan. Tercatat ada dua lelang gagal dalam paket pekerjaan tersebut, yaitu: 1) Pengadaan Konsumsi Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan VIII Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan dengan HPS sebesar Rp 220.823.000,-. 2) Masterplan Pasar Lelang dengan HPS sebesar Rp 1.321.184.000,-. Selanjutnya pada tahun 2013, ULP Kementerian Perdagangan juga telah melakukan *e-tendering* untuk seluruh lelang pengadaan dan juga *e-purchasing*.

♦Tahun Anggaran 2014

Pada tahun anggaran 2014, ULP Kementerian Perdagangan berhasil melaksanakan 120 paket pengadaan barang/jasa dengan total HPS sebesar Rp 295.326.953.810,-. ULP Kementerian Perdagangan juga berhasil melaksanakan 9 paket dari 13 paket pengadaan barang/jasa satker Biro Umum Sekretariat Jenderal yang RUP nya diumumkan melalui aplikasi SiRUP. Total pagu yang dilelang atas 9 paket tersebut adalah sebesar Rp 14.297.337.000,-. Sedangkan 4 paket lainnya direncanakan masuk dalam kegiatan yang dihemat anggarannya.

♦Tahun Anggaran 2015

Pada tahun anggaran 2015, seluruh pengadaan dilaksanakan berdasarkan RUP yang telah diumumkan melalui aplikasi SiRUP. Pada tahun ini, pengadaan barang/jasa yang diproses berdasarkan Rencana Pengadaan melalui ULP Ke-

menterian Perdagangan (RPU) adalah sebanyak 152 paket dengan total nilai HPS sebesar Rp 404.961.885.882,-. Namun pada proses pelaksanaannya terdapat 10 paket yang gagal atau batal dilelang.

Selama tahun anggaran 2015, selain melaksanakan pengadaan dengan menggunakan metode *e-tendering*, ULP Kementerian Perdagangan juga telah melaksanakan *e-purchasing* untuk kendaraan dinas, jasa internet, dan alat pengolah data serta pelaksanaan satu paket pengadaan alat pengolah data dengan metode *e-tendering* cepat melalui SPSE Versi 4 LKPP sebagai langkah uji coba.

Setelah mengetahui seluruh proses pengadaan barang/jasa Kementerian Perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan *e-procurement*, selanjutnya penulis akan membandingkan praktik yang terjadi di lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait *e-procurement*.

Beberapa hal yang hendak penulis bandingkan antara peraturan dan praktiknya terkait penerapan *e-procurement* di Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-procurement*.
2. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan *e-procurement*.
3. Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode *e-tendering*.
4. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode *e-purchasing*.
5. Pihak terkait dengan pelaksanaan *e-procurement*.

Poin pertama yang ingin penulis bahas adalah terkait dengan bunyi pada Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka 13 yang menyebutkan bahwa: "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik." Pasal tersebut menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah harus sudah dilaksanakan secara elektronik. Diikuti dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu hal penting yang diinstruksikan dalam Inpres tersebut adalah bahwa seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan melalui

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan terbukti sudah mengikuti aturan yang tercantum dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Kementerian Perdagangan tercatat sudah melaksanakan seluruh paket pengadaan secara elektronik sejak tahun anggaran 2013 dan tetap diteruskan di tahun anggaran 2014 dan 2015. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSE yang dikembangkan oleh LKPP.

Pada poin kedua, penulis akan membahas mengenai metode yang digunakan dalam penerapan *e-procurement*. Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 106 angka 2 disebutkan bahwa: “Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing*.” Berdasarkan aturan tersebut, metode yang dapat digunakan oleh K/L/D/I dalam melaksanakan pengadaan secara elektronik adalah dengan *e-tendering* atau *e-purchasing*. Sesuai dengan aturan tersebut, Kementerian Perdagangan telah melaksanakan seluruh pengadaan barang/jasa dengan menggunakan dua metode tersebut.

Selanjutnya pada poin ketiga terkait proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan *e-tendering*, Kementerian Perdagangan telah melakukan seluruh rangkaian proses lelang dengan *e-tendering* sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang *E-Tendering*. Dalam lampiran Perka tersebut dijabarkan mengenai tata cara *e-tendering* yang dilalui dalam beberapa proses. Proses pertama adalah persiapan pemilihan yang dilakukan oleh PPK dengan membuat rencana pelaksanaan lelang lalu disampaikan kepada Pokja ULP sebagai panitia yang akan melakukan seluruh proses lelang. Di Kementerian Perdagangan sendiri tahapan ini telah dilakukan, tahap persiapan ini dilaksanakan berbarengan dengan tahap penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Proses selanjutnya berdasarkan Perka Nomor 1 Tahun 2015 adalah pelaksanaan pemilihan yang dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu: 1) pembuatan paket, pengumuman, dan pendaftaran lelang; 2) pemberian penjelasan; 3) pemasukan dokumen kualifikasi; 4) pemasukan/

penyampaian dokumen penawaran; 5) pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran, serta pengumuman pemenang; 6) sanggahan; 7) SPPBJ; 8) Penandatanganan Kontrak. Seluruh proses tersebut dilaksanakan secara online melalui aplikasi SPSE, kecuali penandatanganan kontrak antara PPK dengan Pemenang Lelang yang dilakukan di luar aplikasi.

Poin selanjutnya yaitu penulis akan membahas tentang pelaksanaan *e-purchasing*. Seperti telah dipaparkan sebelumnya, selain menggunakan metode *e-tendering*, Kementerian Perdagangan juga melaksanakan pengadaan barang/jasa menggunakan metode *e-purchasing*. Pelaksanaan *e-purchasing* di Kementerian Perdagangan telah sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing*. Pelaksanaan *e-purchasing* ini dilakukan dengan memilih barang yang tersedia dalam sistem *e-catalogue* yang dikelola oleh LKPP. Pengadaan melalui *e-purchasing* ini bertambah di tahun anggaran 2015, karena Kementerian Perdagangan yang sebelumnya hanya melaksanakan *e-purchasing* untuk pengadaan kendaraan dinas, di tahun anggaran 2015 *e-purchasing* dilaksanakan atas kendaraan dinas, jasa internet, dan alat pengolah data.

Poin terakhir yang penulis bahas adalah mengenai pihak-pihak dalam pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement*, menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pihak yang terkait pada saat metode *e-tendering* digunakan adalah PPK, Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP)/Pejabat Pengadaan, dan Penyedia Barang/Jasa. Tugas masing-masing pihak adalah saat *e-tendering* dimulai dengan Pokja ULP yang menginput daftar paket yang akan dilelang pada aplikasi SPSE berdasarkan rencana pelaksanaan yang telah diterbitkan oleh PPK. Selanjutnya proses lelang juga melibatkan Penyedia Barang/Jasa sebagai peserta lelang. Sedangkan pihak yang terkait dalam pelaksanaan *e-purchasing*, disebutkan dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka 17 bahwa: “*E-Purchasing* dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.” Sebelum peraturan ini diterbitkan, Pokja ULP Kementerian Perdagangan adalah

pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana *e-purchasing*. Di tahun anggaran 2015, kewenangan untuk melaksanakan *e-purchasing* diserahkan kepada PPK dan pejabat pengadaan.

Secara umum, Kementerian Perdagangan telah berhasil melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*). Hal tersebut dapat tercermin dalam pencapaian kinerja Kementerian Perdagangan selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Keberhasilan tersebut telah banyak memberikan dampak positif bagi Kementerian Perdagangan. Dampak positif yang dirasakan Kementerian Perdagangan setelah melaksanakan *e-procurement* dapat dilihat dari capaian kinerja bagian ULP yang pada tahun anggaran 2013 mencapai angka 200%. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2009-2014 ditargetkan implementasi pengadaan secara elektronik pada tahun anggaran 2013 adalah sebesar 50% dari total paket pengadaan, namun realisasinya pada tahun anggaran 2013 ULP Kementerian Perdagangan telah mampu melaksanakan pengadaan melalui *e-procurement* untuk seluruh paket pengadaan yang berarti implementasi telah mencapai angka 100%.

Efisiensi anggaran berfluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun anggaran 2013 efisiensi anggaran melalui pengadaan barang/jasa mencapai 5,40% dimana mampu menghemat keuangan negara sebesar Rp 26.169.607.039,-. Di tahun anggaran 2014, efisiensi anggaran melalui pengadaan barang/jasa turun menjadi 4,60%. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan pada total anggaran Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2014 menjadi sebesar Rp 2.355.162.864.000,-, dimana jika dibandingkan dengan total anggaran Kementerian Perdagangan pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp 3.105.723.944.000,- terdapat penurunan sebesar Rp 750.561.080.000,-. Penurunan total anggaran tersebut dikarenakan pada tahun anggaran 2013 Indonesia menjadi tuan rumah untuk kegiatan APEC dan WTO. Penyelenggaraan kegiatan tersebut membuat Kementerian Perdagangan mendapatkan total anggaran lebih

di tahun anggaran 2013. Penurunan total anggaran berdampak pula pada total anggaran yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa, total HPS yang dilelang pada tahun anggaran 2014 menurun sebesar Rp 187.902.486.027,-.

Tingkat efisiensi anggaran pun mengalami sedikit penurunan, yaitu sebesar 0,8% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2013. Namun, hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi Kementerian Perdagangan dalam mengelola anggaran di tahun selanjutnya karena pada tahun anggaran 2015 Kementerian Perdagangan berhasil meningkatkan kembali capaian efisiensi penggunaan pagu anggaran sebesar 7,2%. Peningkatan angka efisiensi anggaran tersebut tidak terlepas dari usaha Kementerian Perdagangan dalam memperbaiki kinerja mereka dalam menerapkan *e-procurement*. Keunggulan lain dari penerapan *e-procurement* di Kementerian Perdagangan adalah terkait waktu yang diperlukan selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung. Proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara manual memerlukan waktu lebih dari 25 hari kalender. Sedangkan setelah *e-procurement* diterapkan, proses tersebut dapat dipersingkat dengan hanya memerlukan waktu kurang dari 5 hari kalender.

Tujuan *e-procurement* telah mampu dibuktikan langsung oleh Kementerian Perdagangan yang selama kurun waktu tiga tahun terakhir telah menerapkan *e-procurement* secara keseluruhan. Aplikasi SiRUP yang digunakan Kementerian Perdagangan dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dianggap mampu meningkatkan transparansi sejak awal mula pengadaan masih dalam tahap perencanaan anggaran. Selanjutnya, penghematan keuangan negara dapat terlaksana karena tingkat efisiensi dalam penggunaan pagu anggaran juga dirasakan membaik setelah pengadaan barang/jasa dilakukan dengan menggunakan *e-procurement*.

Terlaksananya pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* di Kementerian Perdagangan tidak selalu berjalan dengan baik. Kementerian Perdagangan masih kerap menemukan hambatan dalam penerapan *e-procurement* ini, namun hambatan-hambatan tersebut tidak lantas menjadikan Kementerian Perdagangan berhenti

dalam menerapkan *e-procurement*. Beberapa hambatan yang masih ditemui adalah seperti pada tahun anggaran 2015 masih terdapat kendala pada sistem *e-catalogue* yang dikelola oleh LKPP yaitu *e-catalogue* masih sulit diakses. Hal tersebut menyebabkan beberapa paket sulit dilakukan sehingga proses lelang terpaksa harus dibatalkan.

SIMPULAN

Proses pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* oleh ULP Kementerian Perdagangan dilaksanakan dalam beberapa tahap yang diawali dengan penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP), pengumuman dan pendaftaran lelang, *aanwijzing*, penyampaian dokumen kualifikasi dan penawaran oleh Penyedia, pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran, pengumuman pemenang lelang, sanggahan, serta pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* itu sendiri. Seluruh proses tersebut dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikelola oleh LKPP. Selanjutnya metode yang digunakan dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kementerian Perdagangan adalah *e-tendering* dan *e-purchasing*. Pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa menggunakan *e-tendering* adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP), dan Penyedia Barang/Jasa. Sedangkan terkait *e-purchasing*, pada tahun anggaran 2015 terjadi peralihan wewenang mengenai siapa yang berhak melaksanakan *e-purchasing* dari yang semula wewenang *e-purchasing* dilimpahkan kepada Pokja ULP menjadi dialihkan kepada PPK/Pejabat Pengadaan.

Seluruh mekanisme serta proses pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. Dengan menggunakan *e-procurement* sistem pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, berdasarkan hasil tinjauan penulis bahwa sistem *e-procu-*

remment lebih banyak keuntungannya dibandingkan dengan cara yang konvensional. *E-procurement* ditinjau dari tingkat penggunaan anggarannya lebih efisien karena tiap tahun Kementerian Perdagangan memperoleh selisih yang cukup signifikan antara harga pemenang lelang dengan harga perkiraan sendiri (HPS) setelah menggunakan *e-procurement*, dari segi transparansi lebih transparan karena dilakukan melalui aplikasi SPSE, dan dari segi waktu *e-procurement* lebih efisien karena proses pengadaan barang/jasa lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan cara konvensional.

DAFTAR RUJUKAN

- Mudjisantosa. 2016. *Aspek-Aspek Membuat Dokumen Pengadaan & Evaluasi Penawaran*. Yogyakarta: Prima Print.
- Sianipar, Bangarna. 2013. *Cara Sehat & Sukses Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Perhimpunan Rumah Indonesia.
- Waridah, Ernawati. 2012. *EYD & Seputar Kebahasa-Indonesiaan*. Bandung: Ruang Kata.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang *Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang *Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang *E-Tendering*.
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing*.